

**PROSES DIFUSI INOVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI  
KABUPATEN BOYOLALI**

**Prita Veronica Putri Oktaviana, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti**

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

***ABSTRACT***

*In the era of digitalization, technological and information developments are increasingly developing. The government has made a new breakthrough in the field of population administration through the innovation of Digital Population Identity (IKD). The aim of the IKD is to facilitate and speed up public service transactions in digital form. The process of diffusion of this innovation is important in ensuring its acceptance and successful implementation in society. This research aims to analyze the process of diffusion of Digital Population Identity (IKD) innovation in Boyolali Regency as well as the obstacles in the process of diffusion of Digital Population Identity (IKD) innovation in Boyolali Regency. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation and uses Rogers' theory. The research results show that the process of diffusion of Digital Population Identity (IKD) innovation in Boyolali Regency through stages consisting of knowledge, persuasion, decision making, implementation and confirmation has become the focus in efforts to spread this innovation. However, even though they have passed these stages, the IKD innovation diffusion process in Boyolali Regency has still not reached its maximum level. However, this diffusion process does not run without obstacles. Psychological barriers include low levels of trust, concerns about data security, and negative experiences that influence people's attitudes and interest towards IKD. Meanwhile, practical obstacles include limited human resources in dissemination, lack of technological literacy, difficulty in using the application, and complicated requirements. This obstacle shows that even though it has gone through various stages, further efforts are still needed to increase the effectiveness and acceptance of IKD innovation in the Boyolali Regency community.*

***Keywords: Innovation Diffusion Process, Digital Population Identity, Digital Transformation and Public Services***

## PENDAHULUAN

Tatanan global masa kini, terjadi peningkatan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pada era ini pula masyarakat menuntut pemerintah untuk melakukan pembaharuan. Pembaharuan ini merupakan langkah inovatif yang baru dalam meningkatkan pelayanan publik, dengan tujuan menciptakan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas bagi masyarakat.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mulai menciptakan langkah inovatif dalam pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu pengembangan yang dilakukan yaitu meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan informasi elektronik yang dipakai untuk menggambarkan catatan kependudukan

dan informasi balikan dalam aplikasi digital melalui perangkat elektronik yang menampilkan rincian pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), individu tidak lagi perlu menyimpan kartu identitas fisik mereka.

Dalam proses berkembangnya suatu inovasi pasti di dalamnya terdapat proses penyebaran dari inovasi tersebut. Proses tersebut sering disebut dengan difusi inovasi. Difusi inovasi adalah proses dimana inovasi diperkenalkan atau disebarkan melalui berbagai saluran kepada individu-individu dalam suatu kelompok sosial selama periode waktu tertentu (Rogers, 2003). Proses ini sangat penting karena inovasi merupakan kunci untuk mencapai kemajuan dan perkembangan dalam berbagai bidang.

Pengetahuan masyarakat tentang aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat menerima inovasi ini dengan baik dan memiliki potensi untuk

membantu organisasi yang menangani administrasi kependudukan dalam melakukan tugasnya. Agar inovasi dapat tersebar luas, masyarakat perlu diinformasikan tentang keberadaan inovasi tersebut. Inovasi ini harus disosialisasikan secara merata ke seluruh masyarakat, bahkan ke tingkat paling rendah.

Fakta menyebutkan bahwa sosialisasi terkait inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum mencapai tingkat optimal sepenuhnya, masih ada sebagian masyarakat di Kabupaten Boyolali yang tidak memahami tujuan dan manfaat dari adopsi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai sarana transformasi kartu fisik KTP elektronik. Karena banyaknya informasi yang diberikan oleh layanan, kebijakan tentang perlunya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebelum mencetak KTP masih membingungkan masyarakat.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Capaian Identitas**  
**Kependudukan Digital (IKD) Pada**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan**  
**Sipil Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perolehan	Jumlah IKD	Capaian	Kategori
1.	Kota Magelang	99.081	18.298	18.47%	Tinggi
2.	Temanggung	613.834	83.121	13.54%	Sedang
3.	Kota Surakarta	448.059	46.289	10.33%	Sedang
4.	Wonogiri	835.825	48.440	5.80%	Rendah
5.	Purworejo	618.744	35.849	5.79%	Rendah
6.	Kota Salatiga	147.878	7.786	5.27%	Rendah
7.	Kebumen	1.074.209	48.692	4.53%	Sangat Rendah
8.	Kendal	813.658	36.851	4.52%	Sangat Rendah
9.	Semarang	805.801	35.869	4.45%	Sangat Rendah
10.	Batang	620.995	25.702	4.14%	Sangat Rendah
11.	Pati	1.047.329	35.907	3.43%	Sangat Rendah
12.	Sukoharjo	687.553	22.626	3.29%	Sangat Rendah
13.	Banumas	1.397.886	45.410	3.25%	Sangat Rendah
14.	Wonosobo	694.664	22.270	3.21%	Sangat Rendah
15.	Magelang	1.005.267	30.037	2.99%	Sangat Rendah
16.	Jepara	928.391	27.694	2.98%	Sangat Rendah
17.	Boyolali	823.948	24.347	2.96%	Sangat Rendah
18.	Purbalingga	772.116	22.866	2.96%	Sangat Rendah
19.	Kota Semarang	1.249.381	36.865	2.95%	Sangat Rendah
20.	Klaten	985.890	25.627	2.60%	Sangat Rendah
21.	Kudus	640.403	16.652	2.60%	Sangat Rendah
22.	Pemalang	1.148.898	28.719	2.50%	Sangat Rendah
23.	Demak	904.390	19.196	2.12%	Sangat Rendah
24.	Grobogan	1.124.065	23.559	2.10%	Sangat Rendah
25.	Karanganyar	709.758	14.234	2.01%	Sangat Rendah
26.	Kota Pekalongan	226.939	4.490	1.98%	Sangat Rendah
27.	Cilacap	1.530.354	29.668	1.94%	Sangat Rendah
28.	Banuwangara	786.720	14.399	1.83%	Sangat Rendah
29.	Sragen	760.375	11.696	1.54%	Sangat Rendah
30.	Kota Tegal	210.711	3.156	1.50%	Sangat Rendah
31.	Tegal	1.246.826	17.660	1.42%	Sangat Rendah
32.	Pekalongan	736.406	8.908	1.21%	Sangat Rendah
33.	Brebes	1.500.735	17.450	1.16%	Sangat Rendah
34.	Rembang	496.541	5.343	1.08%	Sangat Rendah
35.	Blora	706.358	7.387	1.05%	Sangat Rendah

Sumber: Dipermaudesdukcapil Jateng, 2023.

Dengan capaian IKD yang sekarang Kabupaten Boyolali menempati urutan 17 di wilayah Jawa Tengah dimana masuk ke dalam kategori sangat rendah. pelaksanaan aktivasi IKD dirasa belum berjalan dengan baik karena jumlah capaian inovasi IKD Kabupaten Boyolali baru sebesar 2,96%, masih terpaut jauh dari target yang telah ditentukan dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yaitu sebesar 25%. Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali mulanya hanya dilakukan di instansi pemerintah namun hingga saat ini perekaman sudah

menyasar masyarakat umum. Diakui, minat masyarakat mendapatkan IKD ini masih minim hal ini disebabkan karena pengurusan administrasi di instansi-instansi kebanyakan masih harus menyertakan KTP Fisik.

Sebagai pengguna aplikasi IKD, masyarakat akan dihadapkan pada pilihan apakah mereka menyukai atau tidak menyukai inovasi tersebut. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat dalam memberikan ulasan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) seperti yang diberikan oleh Berandal Elit pada tanggal 31 Juni 2023 di Google Playstore sebagai berikut :

"kualitas dokumen buram (resolusi rendah), tidak ada opsi download/cetak, sering gagal menampilkan menu yang dipilih, sering terjadi kesalahan (error) saat memilih menu, lalu aplikasi restart sendiri, kegunaan dari aplikasi yang belum bisa diterima oleh semua pihak yang mensyaratkan dokumen, misal masih meminta menunjukkan KTP fisik, fotokopi KTP dsb. Hal ini mirip e-KTP yang masih difotokopi, karena tidak ditegaskan penggunaan sesuai fungsinya oleh pemerintah."

Sedangkan menurut pendapat San Pical pada tanggal 12 September 2023 di App Store sebagai berikut :

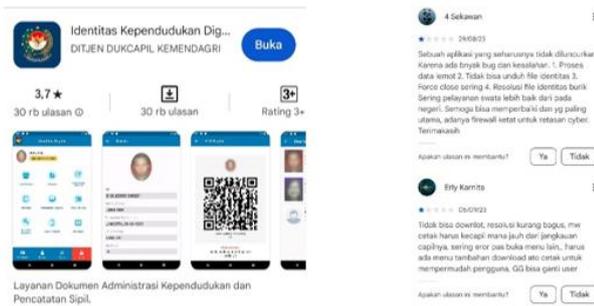
"ini kan aplikasi pemerintah, harusnya kualitasnya Bintang 5. Masa mau buka KTP aja loadingnya lama dan tiba-tiba ada keterangan error. Dokumen lain seperti BPJS, NPWP, Kartu Pemilih dan lainnya sebentar ada, abis itu hilang ga bisa diakses. Serahkan pengelolaan aplikasi ini pada orang yang profesional."

Dari pendapat di atas menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang sulit memahami inovasi Identitas

Kependudukan Digital (IKD). Adanya ulasan yang kurang baik dapat mempengaruhi proses difusi inovasi, dimana akan menurunkan minat atau keinginan masyarakat untuk mengadopsi inovasi tersebut. Selain itu, ulasan yang kurang baik juga dapat mempengaruhi saluran komunikasi sehingga pesan - pesan inovasi tidak tersampaikan baik kepada masyarakat.

Kepuasan muncul sebagai hasil dari penilaian kinerja pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan publik. Penilaian kepuasan pelayanan publik dapat dilihat melalui rating dan ulasan. Rating dan ulasan merupakan hasil respon masyarakat sebagai pengguna layanan. Rating aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat dilihat di data sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
**Rating Aplikasi Identitas**  
**Kependudukan Digital (IKD)**



Sumber : [Google Playstore](#)

Dari Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki rating Bintang satu yang cukup banyak sehingga mengakibatkan rating sebesar 3,7 dari 5. Sekitar 30 ribu orang telah memberikan feedback tentang penggunaan inovasi IKD, namun lebih dari setengahnya memberikan feedback yang kurang positif.

Hal ini terlihat bahwa kualitas layanan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih dirasa kurang baik dan dapat diduga penyebarluasan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan terlihat dari ulasan yang diterima.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dasar dari penelitian yang dapat dijelaskan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk menganalisis proses difusi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali dan menganalisis hambatan dalam proses difusi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers, yang dijabarkan berupa tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap pengambilan keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi.

Difusi inovasi berjalan tidak selalu diterima tetapi banyak juga yang menjadi penghambat inovasi diterima oleh masyarakat. Penelitian terkait proses difusi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali menggunakan pendapat Dr. H Rusydi Ananda, M.Pd dan Amiruddin, M.Pd untuk menganalisis hambatan dalam

proses difusi inovasi yang berupa hambatan psikologis dan hambatan praktis.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Boyolali. Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu yang memiliki pertimbangan berupa seseorang atau organisasi yang memiliki kewenangan terhadap aplikasi IKD dan seseorang yang dinilai mengetahui teknis difusi inovasi IKD.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Difusi Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Boyolali**

#### **a. Tahap Pengetahuan**

Tahap pengetahuan melibatkan kesadaran individu terhadap keberadaan inovasi dan pemahaman individu terhadap

fungsi inovasi tersebut. Tahap ini dimulai saat seseorang menyadari keberadaan inovasi, termasuk pemahaman mengenai jenis inovasi dan manfaat yang didapat dari adopsi inovasi tersebut.

### **1. Saluran Komunikasi Yang Digunakan Dalam Proses Difusi Inovasi IKD**

Inovasi akan menyebar kepada masyarakat sebagai pengguna layanan melewati saluran komunikasi yang digunakan. Saluran komunikasi menentukan kemudahan dan kecepatan seseorang dalam menerima inovasi (Fadhilah et al., 2023).

Disdukcapil Kabupaten Boyolali memanfaatkan 3 saluran komunikasi untuk melakukan difusi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yaitu komunikasi interpersonal berupa getok tular atau komunikasi dari mulut ke mulut.

Saluran komunikasi kelompok berupa kerjasama dengan kecamatan, kelurahan, dan jajaran lainnya, sosialisasi, mengeluarkan surat edaran serta melibatkan kecamatan dan kelurahan serta

beberapa instansi untuk menyebarluaskan inovasi IKD.

Kemudian, saluran komunikasi media massa melalui penyebarluasan dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki Disdukcapil Kabupaten Boyolali juga masih terbatas yaitu hanya berupa Instagram.

Saluran komunikasi paling efektif selanjutnya yang digunakan Disdukcapil Kabupaten Boyolali untuk menyebarluaskan inovasi IKD ke masyarakat yaitu dengan jemput bola.

## **2. Pengetahuan Atau Keterampilan Untuk Menerima Inovasi IKD**

Dalam konteks difusi inovasi, tingkat pengetahuan terkait keberadaan suatu inovasi merupakan langkah awal yang penting dalam proses penyebarannya.

Adanya pemahaman yang sama terkait pengetahuan akan keberadaan dan cara penggunaan inovasi IKD. Terkait pemahaman mengenai apa inovasi IKD setiap masyarakat sudah mengetahui adanya

inovasi ini. Identitas kependudukan digital mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk mengelola dan mengotentikasi identitas seseorang secara online. Dengan adanya inovasi ini, individu dapat mengakses layanan pemerintah dan swasta secara aman dan efisien, serta memfasilitasi proses seperti verifikasi identitas.

Terkait pemahaman cara penggunaan inovasi IKD dirasa belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penggunaan inovasi ini sehingga mereka memutuskan untuk tidak menggunakan inovasi ini.

### **b. Tahap Persuasi**

Tahap persuasi terjadi pada tingkat pikiran individu. Secara psikologis, seseorang mulai tertarik pada suatu inovasi dan mulai mencari lebih banyak informasi mengenai inovasi tersebut. Setelah menerima informasi, individu akan menginterpretasikannya (As'adi, 2020).

## **1. Persepsi Selektif (*selective perception*)**

Dalam konteks ini, persepsi selektif dapat mempengaruhi bagaimana orang menghadapi, merespons, dan mengadopsi inovasi tersebut. Dalam proses difusi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), di dalam persepsi selektif terdapat ketertarikan individu untuk menggunakan inovasi.

Ada beberapa alasan ketertarikan masyarakat terkait inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Inovasi IKD adalah menarik bagi masyarakat karena dirasa mudah dimengerti dan praktis sehingga memberikan efisiensi dalam administrasi kependudukan. Alasan ketertarikan lain berasal dari adanya keharusan dari pihak tertentu untuk aktivasi inovasi IKD.

Sebagian masyarakat juga merasa IKD belum diakui sebagai alat yang sah untuk digunakan dalam berbagai layanan publik sehingga belum tertarik untuk aktivasi inovasi IKD. Dari hasil wawancara

juga ditemui belum banyak masyarakat yang memilih inovasi IKD dibandingkan KTP elektronik. Hal ini dilatarbelakangi kepercayaan, keamanan, pengakuan resmi dan keandalan.

## **2. Sikap Yang Muncul Dalam Proses Difusi Inovasi IKD**

Setelah masyarakat menggunakan aplikasi IKD akan mencari penguatan terhadap keputusan yang diambil. Dilihat dari sikap masyarakat dan pegawai setelah menggunakan aplikasi IKD.

Masyarakat merasa senang akan hadirnya inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena adanya identitas yang sudah terdigitalisasi. Namun masyarakat merasa kurang terbantu dan kurang puas akan layanan administrasi menggunakan aplikasi IKD baik dari kemanfaatan aplikasi IKD yang belum dirasakan maupun fitur di dalam aplikasi. Diskusi yang berkelanjutan dan penyebaran informasi tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki dampak signifikan terhadap sikap dan

penerimaan masyarakat terhadap inovasi ini. Dalam temuan lapangan yang melibatkan 9 informan, hanya 2 dari mereka yang secara aktif terlibat dalam diskusi dan pembicaraan mengenai IKD dengan orang lain. Mereka melakukan diskusi ini terutama dalam konteks rapat RT RW dan kegiatan olahraga seperti tenis.

### c. Tahap Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan untuk mengadopsi inovasi dimulai ketika seseorang terlibat dalam kegiatan yang membimbingnya untuk memilih apakah menerima atau menolak inovasi yang ditawarkan (Febriana & Setiawan, 2016). Sebelum memutuskan untuk mengadopsi sebuah inovasi, terdapat beberapa sifat-sifat inovasi yang menjadi pertimbangan guna mendukung keputusan yang akan diambil. Sifat-sifat tersebut yakni keuntungan relatif (*relative advantage*), kesesuaian (*compatibility*), kerumitan (*complexity*), tahapan dicoba (*trialability*), kemungkinan diamati (*observability*) (Rogers, 2003).

## 1. Kesesuaian (*Compatibility*) Inovasi IKD

*Compatibility* merupakan tingkat penerimaan suatu inovasi ditentukan oleh sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dalam suatu lingkungan sosial, kesesuaian dengan pengalaman yang telah dialami, dan relevansi inovasi tersebut dengan kebutuhan individu yang menerimanya (Latip et al., 2021).

Adanya perbedaan pendapat yang muncul dari masyarakat. Sebagian masyarakat merasa bahwa inovasi IKD ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari IKD tidak hanya mencakup KTP, tetapi juga dokumen pendukung lainnya. Kesesuaian inovasi IKD dengan perkembangan zaman menjadi sorotan positif.

Namun sebagian masyarakat juga merasa bahwa inovasi IKD belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari kelengkapan fitur dan ketidaksiapan instansi lain.

## **2. Kompleksitas (*Complexity*) Inovasi IKD**

Suatu inovasi bisa saja menghadapi tingkat kesulitan dalam penerapannya, sehingga kompleksitas mengacu pada seberapa sulit suatu inovasi dapat diterima oleh masyarakat, serta seberapa sulit untuk dipahami atau diadopsi (Rogers, 2003).

Sebuah inovasi dianggap rumit bila tidak ada kemudahan dan kendala yang terjadi. Para pegawai menganggap bahwa aplikasi IKD mudah untuk dipahami dan digunakan. Namun, sebagian masyarakat menganggap bahwa aplikasi IKD ini tidak mudah dipahami dan digunakan. Di awal penggunaannya ditemui berbagai kendala yang dirasakan baik itu dari sistem aplikasi maupun diri masyarakat sendiri.

Meskipun terdapat kendala saat pertama kali digunakan inovasi IKD menjadi salah satu cara digitalisasi KTP elektronik yang dapat masyarakat gunakan sebagaimana mestinya untuk pengganti identitas tanpa harus membawa dokumen

secara fisik ketika keluar rumah. Dengan kemudahan ini inovasi layak untuk disebarluaskan dan diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Boyolali melalui berbagai macam sosialisasi baik itu dilakukan secara *offline* di maupun *online* dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.

### **d. Tahap Implementasi**

Selama tahap implementasi atau pelaksanaan inovasi telah disetujui, inovasi tersebut akan mulai diterapkan dengan mengubah perilaku secara nyata (Rogers, 2003). Individu akan menilai inovasi berdasarkan manfaatnya dan cenderung membandingkannya dengan risiko penggunaannya (Fakhruzzaman & Dimitrova, 2020).

### **1. Waktu Digunakan Dalam Proses Difusi Inovasi IKD**

Dalam proses difusi inovasi, waktu memegang peranan penting karena

merupakan aspek utama dalam komunikasi (Latip et al., 2021). Selain itu, dimensi waktu juga berpengaruh terhadap sensitivitas individu terhadap inovasi.

Proses difusi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali sudah diperkenalkan pada April 2022 hingga tahap pelaksanaan dan penyebarluasannya ke masyarakat umum pada awal tahun 2023. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa implementasi inovasi IKD dan aktivasi aplikasi terjadi pada tahun 2023.

## **2. Efektivitas Dan Efisiensi Layanan**

Pemahaman dan penerimaan terhadap Identitas Kependudukan Digital (IKD) sangat bervariasi di kalangan masyarakat. Beberapa orang mungkin merasa bahwa IKD memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi publik, sementara sebagian lainnya mungkin belum merasakan manfaat yang sama. Perbedaan pandangan ini bisa dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk perbedaan dalam

pemahaman tujuan inovasi tersebut. Perlunya pemberi layanan inovasi untuk memperhatikan peralihan saat terjadi perubahan, kemudian memastikan sosialisasi yang maksimal terkait dengan inovasi IKD. Jika proses peralihan dalam difusi inovasi tidak diperhatikan dapat menimbulkan kesulitan bagi orang-orang yang menerimanya (Laenens et al., 2018).

### **e. Tahap Konfirmasi**

Keputusan akhir tentang menerima atau menolak inovasi terjadi pada tahap konfirmasi. Jika inovasi dianggap lebih baik, kinerjanya tidak memuaskan, atau penggunaan inovasi menjadi tidak memuaskan, adopsi inovasi dapat dihentikan (Abdullah dalam Putra, 2018).

#### **1. Keuntungan Relatif Inovasi IKD**

Keunggulan relatif adalah sejauh mana penerimaan suatu inovasi yang bergantung pada manfaat ekonomi, penghargaan sosial, atau kepuasan pengguna inovasi tersebut (Latip et al., 2021). Inovasi dianggap lebih baik dan

unggul oleh penggunaanya jika dibandingkan dengan inovasi sebelumnya atau inovasi lainnya. Keunggulan dari inovasi tersebut dapat dilihat dari aspek waktu, aspek ekonomi, dan kenyamanan dalam menerima pelayanan. Bahkan, inovasi ini mampu mencegah praktik curang yang mungkin dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagian masyarakat merasa mendapatkan keuntungan ketika menggunakan inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Adanya inovasi IKD dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya inovasi IKD juga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Meskipun demikian sebagian masyarakat belum merasakan secara langsung keuntungan dari aplikasi IKD. Dari 9 informan yang diwawancarai, 8 diantaranya merasa cocok dengan penggunaan inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) hal ini dilatarbelakangi karena mobilitas tinggi dan

tingkat literasi teknologi yang meningkat di kalangan masyarakat. Namun, terdapat 1 informan yang merasa tidak cocok menggunakan IKD, karena jarang melakukan perjalanan dan merasa bahwa inovasi tersebut tidak relevan bagi gaya hidupnya.

## **2. Penggunaan Inovasi IKD Yang Berlanjut**

Pada fase ini individu sedang mencari alasan untuk keputusan inovasinya, namun ada kemungkinan bahwa inovasi tersebut dapat diubah jika ada pesan yang bertentangan dalam prosesnya.

Sebagian masyarakat Kabupaten Boyolali tetap menggunakan aplikasi IKD karena merasa terbantu dalam menunjukkan identitas diri, masyarakat merasakan efektivitas dan efisiensi dari adanya inovasi IKD.

Namun terdapat pula sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak melanjutkan menggunakan IKD untuk saat ini, hal ini dikarenakan keterbatasan

penerimaan serta manfaat dari inovasi IKD. Meskipun beberapa informan telah menggunakan IKD dalam kehidupan sehari-hari dengan pengalaman positif, masih ada tantangan dalam mendorong adopsi yang lebih luas dan penggunaan berlanjut inovasi ini. Hal ini menyoroti pentingnya terus mengembangkan kesadaran dan penerimaan terhadap IKD serta peran penting pihak terkait dalam memfasilitasi integrasi yang lebih luas dari inovasi ini dalam berbagai proses dan layanan.

## **B. Hambatan Dalam Proses Difusi Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Boyolali**

### **a. Hambatan Psikologis**

Hambatan psikologis terjadi ketika kondisi psikologis individu menjadi faktor yang mempengaruhi penolakan terhadap suatu inovasi. Dalam konteks penerimaan perubahan dalam organisasi, kelompok, atau individu dengan pengalaman masa lalu yang tidak positif akan mempengaruhi kemampuan dan keberanian mereka dalam menghadapi perubahan tersebut.

## **1. Tingkat Kepercayaan Dan Ketertarikan Masyarakat Terkait Inovasi IKD**

Keadaan psikologis seseorang dalam menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital ditentukan berdasarkan kepercayaannya menggunakan aplikasi ini dan kepercayaan akan keamanan data yang tersimpan di aplikasi IKD.

Tingkat kepercayaan dan ketertarikan masyarakat terhadap inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah. Faktor-faktor seperti belum jelasnya manfaat IKD, keterbatasan penggunaan oleh layanan publik, dan pengalaman negatif dalam penggunaan teknologi menjadi penyebab utama ketidakpercayaan masyarakat terhadap IKD.

## **2. Pengalaman Masyarakat Setelah Mengetahui Inovasi Identitas Kependudukan Digital IKD**

Sikap merupakan hal krusial karena akan menentukan tindakan yang akan diambil oleh individu. Sikap senang dan

kurang tertarik terhadap suatu inovasi akan mempengaruhi keberlanjutan inovasi kedepannya. Sikap masyarakat dapat terlihat dari pendapat individu dalam merasakan kelebihan dan kekurangan terhadap inovasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

Kelebihan aplikasi IKD yaitu aplikasi IKD memberikan kelebihan yang signifikan dalam hal kemudahan akses dan mobilitas. Penggunaan aplikasi IKD juga dirasa masyarakat sangat simpel dan praktis.

Adapun kekurangan dari aplikasi IKD yaitu adanya kekhawatiran terkait kebocoran data pribadi. Ketidakmampuan masyarakat merasakan manfaat penuh dari aplikasi IKD karena belum bisa digunakan pada berbagai layanan publik. Aplikasi IKD bergantung pada koneksi internet, sehingga ketika pengguna berada di suatu tempat dengan jaringan yang tidak stabil atau lemah, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini. Aplikasi IKD hanya bisa digunakan dengan spesifikasi HP tertentu dimana satu HP untuk satu identitas, sehingga menciptakan

ketidaksetaraan akses dan menjadi hambatan bagi keluarga-keluarga yang harus berbagi perangkat untuk mengakses identitas digital mereka. Terakhir kurangnya sosialisasi terkait aplikasi IKD terbukti banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi ini.

## **b. Hambatan Praktis**

Hambatan praktis merujuk pada rintangan yang terutama bersifat fisik, seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan sistem.

### **1. Sumber Daya Manusia Dalam Proses Difusi Inovasi IKD**

Dalam proses pengembangan difusi inovasi mencakup kualitas SDM, ketersediaan SDM dan peran individu dalam proses difusi inovasi. Sumber daya dalam setiap organisasi memiliki ketersediaan dan kualitas yang beragam.

Dalam pengembangan difusi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kualitas dan ketersediaan SDM memegang peran krusial. Dalam proses difusi inovasi

IKD terdapat keterbatasan SDM yang belum memadai, sehingga target capaian nasional belum terpenuhi. Selain itu kurangnya keahlian dan akses yang memadai dalam tim aktivasi untuk menjalankan proses difusi inovasi. Ada sebagian masyarakat yang tidak melek teknologi sehingga peluang untuk menerima inovasi IKD lebih kecil.

## **2. Teknis Dalam Proses Difusi Inovasi IKD**

Hambatan teknis dalam proses difusi inovasi mengacu pada kendala-kendala yang timbul dari aspek-aspek teknologi yang dapat memperlambat atau menghambat penerimaan dan penggunaan inovasi baru oleh masyarakat atau organisasi.

Hambatan teknis melibatkan sejumlah kendala, seperti keterbatasan akses terhadap alat perekaman biometrik, biaya tinggi, infrastruktur jaringan yang kurang mendukung, seringnya masalah server, dan kehilangan dokumen dalam sistem. Selain itu, adanya tantangan terkait dengan

persyaratan penggunaan yang belum bisa dipenuhi oleh sebagian masyarakat, seperti ketersediaan ponsel yang sesuai, kestabilan jaringan, dan prosedur aktivasi yang dianggap rumit. Semua ini dapat memperlambat penerimaan dan penggunaan IKD oleh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Proses difusi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari pengetahuan, persuasif, pengambilan keputusan, implementasi, dan konfirmasi telah menjadi fokus dalam upaya menyebarkan inovasi ini. Namun, meskipun telah melewati tahapan tersebut, proses difusi inovasi IKD di Kabupaten Boyolali masih belum mencapai tingkat maksimal.

Pada tahap pengetahuan, masyarakat memiliki pemahaman tentang keberadaan IKD namun kurang dalam cara penggunaannya. Penyebaran inovasi IKD dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi. Pada tahap persuasif,

masyarakat menunjukkan pandangan positif terhadap inovasi IKD. Ketidakpuasan pengguna terhadap aplikasi IKD serta masih minimnya pengguna yang terlibat aktif dalam diskusi mengenai IKD menciptakan tantangan dalam tahap persuasif. Pada tahap pengambilan keputusan, keputusan masyarakat untuk menggunakan IKD dipengaruhi oleh kesesuaian inovasi dengan kebutuhan, pemahaman tujuan inovasi dan kepercayaan akan keamanan. Selanjutnya pada tahap implementasi, belum optimalnya waktu yang digunakan dalam proses difusi inovasi. Tahap implementasi ini juga mencakup uji coba penggunaan oleh masyarakat umum dengan variasi pemahaman dan penerimaan. Tahap terakhir yaitu tahap konfirmasi, sebagian masyarakat merasa mendapatkan keuntungan dari penggunaan IKD, sementara sebagian masyarakat lainnya belum merasakan manfaat yang cukup.

Berjalannya proses difusi inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Boyolali masih ditemui berbagai

hambatan. Hambatan psikologis meliputi rendahnya tingkat kepercayaan, kekhawatiran akan keamanan data, dan pengalaman negatif yang mempengaruhi sikap dan minat masyarakat terhadap IKD. Sementara hambatan praktis meliputi keterbatasan SDM dalam penyebarluasan, kurangnya literasi teknologi, kesulitan penggunaan aplikasi, dan persyaratan yang rumit. Hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun telah melalui berbagai tahapan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan inovasi IKD di masyarakat Kabupaten Boyolali.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi berkelanjutan terhadap *multistakeholder*.
- b. Melakukan demonstrasi atau bukti nyata tentang keefektifan inovasi IKD.

- c. Perlu adanya *training* untuk petugas pelayanan di baik kecamatan, kelurahan bahkan RT RW dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- d. Perlunya peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat yang sudah melaksanakan perekaman KTP Elektronik untuk segera melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih tidak terhingga kepada pihak - pihak yang berkontribusi dalam penulisan artikel jurnal penelitian ini kepada:

1. Segenap dosen S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T. dan Ibu Dr. Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si, selaku dosen pembimbing.
3. Ibu Drs. Nina Widowati, M.Si, selaku ketua dosen penguji.
4. Serta dari pihak-pihak yang memberikan dukungan moral dan finansial sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, F. (2021). Manajemen Strategi Desa Wisata Gronjong Wariti Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Mejono Kabupaten Kediri. *Jurnal Publika*, 9(2), 171–184.
- Anggitlistio, D. B. (2023). *Difusi Inovasi Si D'Nok dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Artanto, A. Y. T., & Suriyanto, A. D. (2021). PROSES DIFUSI INOVASI DAN ADOPSI APLIKASI “PEDULI LINDUNGI” CALON PENUMPANG KRL DI STASIUN KLATEN-SOLO. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 568-580.
- As'adi, M. H. (2020). Difusi Inovasi dan Adopsi Inovasi 99design.com (Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta). *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 211–232.  
<https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.29>
- Cahyani, V. R. N., Astuti, R. S., & Santoso, R. S. (2022). DIFUSI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO. *Journal of Public*

- Policy and Management Review*, 11(3), 29-41.
- Devia, D., & Aisyah, S. (2020). Difusi Inovasi Kesehatan Masyarakat Melalui Program Jamban Arum (Antar Ke Rumah) di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1), 43-50.
- Fadhilah, A. R. (2023). *Difusi Inovasi Pelayanan Sedino Mesti Dadi (SEMEDI) Kabupaten Sragen* (Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK).
- Fadilah, G. N., & Maesaroh, M. (2020). ANALISIS INOVASI PELAYANAN 6 IN 1 (ELEKTRONIK LAHIR MATI PINDAH DATANG) DI DISPENDUK CAPIL KOTA SURABAYA. *Journal of Publik Policy and Management Review*, 9(2), 71-87.
- Fakhruzzaman, M. N., & Dimitrova, D. V. (2020). Factors influencing e-government adoption in indonesia: The importance of perceived risk. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 125-131.
- Febriana, K. A., & Setiawan, Y. B. (2016). Komunikasi dalam Difusi Inovasi Kerajinan Enceng Gondok di Desa Tuntang, Kabupaten Semarang. *Jurnal the messenger*, 8(1), 17-26.
- Gabriella, V., & Hartanti, L. E. P. (2019). Analysis Of Strategy And Implementation Diffusion Of Innovation Of Qlue Application Technology In Jakarta Smart City. *Jurnal InterAct*, 8(1), 6-15.
- Idama, F. D., Ansari, A. N., & Winindyasari, M. (2020). Diffusion of Innovation: The Hologram Shape of President Jokowi's Appearance at Smart Citizen Day 2019 Event. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 3(1), 21-30.
- Laenens, W., Van den Broeck, W., & Mariën, I. (2018). *Channel choice determinants of (digital) government communication: A case study of spatial planning in Flanders*. *Media and Communication*, 6(4), 140–152.
- Latip, A. E., Suparman, A., & Nadiroh. (2021). *Difusi Inovasi Pembelajaran Tematik* (Issues 59–104).
- Matindas, K., Hubeis, A. V. S., & Saleh, A. (2010). Saluran Komunikasi Kelompok Berbasis Gender pada Komunitas Petani Sayuran Organik (Kasus di Megamendung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(1), 246248.
- Matindas, K., Hubeis, A. V. S., & Saleh, A. (2010). Saluran Komunikasi Kelompok Berbasis Gender pada Komunitas Petani Sayuran Organik (Kasus di Megamendung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(1), 246248.
- Nurfauziah, N. M., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus: Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes). *Journal of Publik Policy and Management Review*, 9(2), 15-34.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
- Pratama, R. N., & Adiarto, A. (2022). Difusi Inovasi Program Electronic Traffic

- Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 92-112.
- Pratiwi, D. A. E. P. (2023). *Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif di indonesia tahun 2020-2022 pendekatan asian development bank (adb)/DINI ALVI EKA PRATIWI* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).
- Putri, B., & Reviandani, O. (2023). Penerapan E-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP Digital di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1).
- Rochmaniah, A., & Jariyah, A. (2018). Difusi Inovasi “Program Desa Melangkah” di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna*, 14(2), 168-179.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovation*. New York: The Free Press
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations 5th Edition*. New York: Free Press.
- Rohmah, A., Abiyyu, K. Y., Elisa, C., Nurasimah, Pasapan, N. L., Safika, Firdaus, M. N., & Permatasari, N. R. (2022). Adopsi Inovasi Layanan Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01), 47–60. <https://doi.org/10.46937/20202239408>
- Safitri, R., Asmawi, A., & Arif, E. (2019). Difusi Inovasi Program Pemerintah: Studi Komunikasi Pembangunan Pada Kelompok Wanita Tani Anugrah Kabupaten Padang Pariaman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 502-513.
- Simanjuntak, M. B., & Alexandrina, E. (2022). PROSES DIFUSI INOVASI PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA RUSUN MARUNDA DALAM MEMPRODUKSI KAIN BATIK SEMANGGI (STUDI DESKRIPTIF PADA LABEL SEJAUH MATA MEMANDANG).
- Syasdawita, Z., & Bachtiar, R. (2022). Difusi Inovasi Aplikasi Pengaduan Online Masyarakat APEKESAH Kota Batam Tahun 2020 (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam).
- Wibowo, I. T. (2019). Proses Difusi Inovasi Program Sakti (Studi Kasus Proses Difusi Inovasi Program Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Ditjen Perbendaharaan di DI Yogyakarta Tahun 2018). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(4), 323-337.